

**EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI
(Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Prabumulih)**

(Skripsi)

Oleh

Muhammad Rizki Utama



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Prabumulih)

Oleh

MUHAMMAD RIZKI UTAMA

Walikota Prabumulih mempunyai inisiatif mengajak Baznas Kota menyalurkan sebagian dana dari potongan gaji pegawai Pemerintah Kota, membangun rumah layak huni dalam rangka pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Evaluasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Prabumulih yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Prabumulih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Prabumulih yang dilakukan oleh Baznas Kota Prabumulih dalam hal Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan semuanya sudah berhasil, sekalipun masih ada temuan Peneliti di lapangan bahwa antrian masyarakat yang lolos mendapat bantuan pembangunan harus menunggu 1 bulan proses pembangunan rumah dan masyarakat yang mendapat bantuan pembangunan rumah layak huni tidak mendapat tempat tinggal sementara. Saran dari Peneliti Baznas Kota Prabumulih diharapkan harus tepat waktu dalam menyusun estimasi waktu dan memberikan tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang rumahnya sedang dibangun.

Kata kunci : Evaluasi Program, Badan Amil Zakat Nasional, Rumah Layak Huni

ABSTRACT

EVALUATION OF THE CONSTRUCTION OF INHABITABLE HOUSE PROGRAM

(A Study at the National Zakat Agency of Prabumulih)

By

MUHAMMAD RIZKI UTAMA

The Mayor of Prabumulih has the initiative to invite the National Zakat Agency City to channel some of the funds from the salary deductions for City Government employees, to build livable houses in the context of poverty alleviation. This study aimed to know and analyze the Evaluation of the Construction of Inhabitable House Program at Prabumulih held by the National Zakat Agency of Prabumulih. The descriptive qualitative research approach was used in this study. The result showed that the Evaluation of the Construction of Inhabitable House Program at Prabumulih held by the National Zakat Agency of Prabumulih in terms of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equitable, Responsiveness, and Accuracy were all successful, even though in the field the researcher still find that there were the queues of people who receiving construction assistance must wait a month for the process of building a house and the people who get assist for the construction of the inhabitable house were not provided with the temporary house. The researcher suggested that the National Zakat Agency of Prabumulih was required to be on time in producing time estimates and providing temporary houses for people whose houses were being built.

Keywords: Program Evaluation, National Zakat Agency, Inhabitable House

**EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI
(Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Prabumulih)**

Oleh

Muhammad Rizki Utama

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

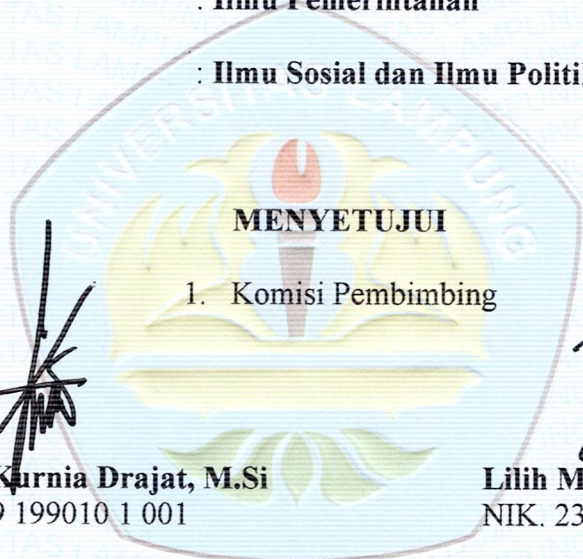
Judul Skripsi : **EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Prabumulih)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Rizki Utama**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716021010**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



[Handwritten signature of Drs. Denden Kurnia Drajat]

Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si
NIP. 19600729 199010 1 001

[Handwritten signature of Lilih Muflihah]

Lilih Muflihah, S.I.P., M.I.P
NIK. 231602820509201

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

[Handwritten signature of Drs. R. Sigit Krisbintoro]

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si**

Sekretaris : **Lilih Muflihah, S.I.P., M.I.P**

Penguji : **Drs. Ismono Hadi, M.Si**



Three handwritten signatures are visible on the right side of the page, each written over a horizontal line. The top signature is in black ink, the middle one is in blue ink, and the bottom one is in blue ink.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP.19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **12 November 2021**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 November 2021



uat Pernyataan

Muhammad Rizki Utama
NPM. 1716021010

Catatan :
Pernyataan ini diletakan pada halaman setelah Abstrak

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Rizki Utama, anak pertama dari 2 (dua) bersaudara. Dilahirkan di Prabumulih, pada tanggal 28 Juni 1999 dari pasangan Bapak Marsul Hadi dan Ibu Nurhumaidah. Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari tingkat sekolah dasar yaitu SD Negeri 48 Prabumulih pada tahun 2005 dan lulus tahun 2011. Pendidikan sekolah menengah pertama, Penulis selesaikan di SMP Negeri 8 Prabumulih pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Kemudian, pendidikan sekolah menengah atas Penulis selesaikan di SMA Negeri 3 Prabumulih pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis dinyatakan lulus pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama kuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Penulis mengikuti kegiatan demi menunjang kapasitas dan kualitas diri. Penulis aktif di Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) Fisip Unila sebagai anggota BPH pada tahun 2018-2019. Selain di internal kampus Penulis juga menjalani aktivitas organisasi kekeluargaan di Ikam Sumsel Unila pada tahun 2018-2020. Demikian sekelumit aktivitas Penulis di masa kuliah sejak rentang waktu 2017-2021.

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.

(Q.S Al-Baqarah ayat 216)

Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.

(HR. Muslim)

Jika kita tidak mampu menjadi pelita yang menerangi malam, maka jadilah kunang-kunang yang menghiasi malam.

(M. Rizki Utama)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar hamba-Mu sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa

Ibu dan Ayah tercinta

Nurhumaidah dan Marsul Hadi

Adik Tersayang

Muhammad Ahlan Ramadhani

Terimakasih untuk semua yang mendoakan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Evaluasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Prabumulih)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sebagai keterbatasan yang ada pada diri Penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
5. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberikan kritik, saran, nasehat, dan motivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
6. Ibu Lilih Muflihah, S.I.P., M.I.P. selaku Pembimbing Kedua skripsi yang telah bersedia membimbing Penulis dalam mengerjakan skripsi dengan memberikan saran dan koreksinya sehingga Penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
7. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si. selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik dan saran, serta memotivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

8. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama belajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
9. Staf Akademik dan Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi, yang telah banyak membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.
10. Seluruh pihak Baznas Kota Prabumulih yang telah memberikan izin penelitian serta bersedia memberikan banyak data dalam proses penelitian sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kedua orang tua tercinta Ayah Marsul Hadi dan Ibu Nurhumaidah yang selalu senantiasa mendukung, berdoa dan berusaha keras dalam segala keterbatasan untuk menjadikan Penulis sebagai anak yang berpendidikan. Semoga ilmu yang Penulis dapatkan bermanfaat bagi orang banyak dan sebagai amal jariyah yang akan selalu mengalir kepada Ayah dan Ibu tercinta.
12. Seluruh keluarga besar Ibnu Hajar yang selalu memberikan doa dan semangat untuk Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Lampung dengan sebaik-baiknya.
13. Seluruh keluarga besar Bahori yang memberikan doa serta nasehat untuk Penulis dalam menjalankan pendidikan di Universitas Lampung sehingga memberikan energi positif untuk Penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
14. Sahabat seperjuangan Nicho Chaesar Chaniago, S.IP, Septian Adi Putra, S.IP, Mulyadin Maryana, Amri Maulana, Riandika Ramanda, Faisal Huda, Tedi Febrian, Ichsan, Ajik Krida Pratama, dan Agung Ilham Bahari semoga sukses untuk langkah-langkah ke depan dan semoga silaturahmi senantiasa terjaga dengan baik.
15. Seluruh keluarga besar Ikam Sumsel Unila, keluarga besar Griya Delicia yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada Penulis.
16. Seluruh kawan-kawan seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas bantuan dan dukungan selama ini. Semoga silaturahmi tetap terjaga.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua yang membutuhkan terutama bagi Penulis, maka saran dan kritik yang bersifat membangun Penulis. Harapan dan akhir kata Penulis ucapkan terimakasih, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baiknya serta melindungi dan meridhoi kita semua.

Bandar Lampung, 12 November 2021

Muhammad Rizki Utama

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Singkatan	v

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang Evaluasi	10
2.1.1. Konsep Evaluasi	10
2.1.2. Tujuan Evaluasi	10
2.1.3. Evaluasi Program	11
2.1.4. Pendekatan Evaluasi	13
2.1.5. Kriteria Evaluasi	14
2.2. Konsep Pembangunan	20
2.3. Rumah Layak Huni	23
2.4. Rumah Tidak Layak Huni	24
2.5. Kerangka Pikir	24

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian	26
3.2. Fokus Penelitian	27
3.3. Lokasi Penelitian	28
3.4. Informan	29
3.5. Jenis Data	30
3.6. Teknik Pengumpulan Data	30
3.7. Teknik Pengolahan Data	34
3.8. Teknik Analisis Data	35
3.9. Teknik Validasi Data	37

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kota Prabumulih	38
4.1.1. Letak Geografis	38
4.1.2. Lambang Kota Prabumulih	39
4.1.3. Visi dan Misi Kota Prabumulih	41
4.2. Baznas Kota Prabumulih	41

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian	45
5.1.1. Efektivitas Program Pembangunan Rumah Layak Huni	45
5.1.2. Efisiensi Program Pembangunan Rumah Layak Huni	53
5.1.3. Kecukupan Program Pembangunan Rumah Layak Huni.....	59
5.1.4. Perataan Program Pembangunan Rumah Layak Huni	63
5.1.5. Responsivitas Program Pembangunan Rumah Layak Huni	69
5.1.6. Ketepatan Program Pembangunan Rumah Layak Huni	75
5.2. Pembahasan	79
5.2.1. Efektivitas	80
5.2.2. Efisiensi	81
5.2.3. Kecukupan	83
5.2.4. Perataan	84
5.2.5. Responsivitas	86
5.2.6. Ketepatan	88

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan	91
6.2. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel:

1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2020	1
2. Jumlah Potongan Gaji Pegawai Pemerintah Kota Prabumulih	4
3. Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni oleh Baznas Kota Prabumulih Tahun 2017-2020	5
4. Penelitian Terdahulu	6
5. Kriteria Penilaian Kinerja Kebijakan	14
6. Daftar Informan Penelitian	29
7. Waktu Pelaksanaan Wawancara	31

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar:

1. Kerangka Pikir Penelitian	25
2. Lambang Kota Prabumulih	39
3. Rumah Masyarakat yang Menerima Bantuan Program Pembangunan Rumah Layak Huni	51
4. Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program Pembangunan Rumah Layak Huni	55
5. Kualitas Bangunan Program Pembangunan Rumah Layak Huni	57
6. Seleksi Calon Penerima Program Pembangunan Rumah Layak Huni	67
7. Persepsi Masyarakat Penerima Bantuan Program Pembangunan Rumah Layak Huni	71
8. Persepsi Pegawai Lingkungan Kota Prabumulih Dengan Adanya Potongan Gaji Setiap Bulan Untuk Program Baznas Kota Prabumulih	74
9. Penilaian Kondisi Rumah Tidak Layak Huni dan Surat Pernyataan	78

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
Baznas	: Badan Amil Zakat Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Perwako	: Peraturan Walikota
PUEBI	: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SOP	: Standar Operasional Pekerjaan
UMKM	: Usaha Menengah Kecil Mikro
ZIS	: Zakat, Infaq, Sadaqoh

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar bagi negara manapun dan menjadi pusat perhatian dunia. Kemiskinan menjadi salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu negara. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan wilayah tersebut, dengan demikian kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan.

Kemiskinan menjadi masalah penting, sehingga menjadi suatu fokus penelitian bagi pemerintah. Masalah kemiskinan yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan merupakan masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan, hal ini diperkuat dengan angka statistik yang memberikan informasi masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 1.081,59 ribu jiwa atau 12,66 persen pada tahun 2020. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan dengan cara dibentuknya program pembangunan rumah tidak layak huni. Program tersebut dapat menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)		Persentase Penduduk Miskin (persen)	
		2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Ogan Komering Ulu	46,84	47,30	12,77	12,75
2	Ogan Komering Ilir	124,14	123,34	15,01	14,73
3	Muara Enim	78,75	79,27	12,41	12,32
4	Lahat	65,03	65,75	15,92	15,95
5	Musi Rawas	53,82	54,95	13,37	13,50

1	2	3	4	5	6
6	Musi Banyuasin	105,83	105,38	16,41	16,13
7	Banyuasin	96,55	96,27	11,33	11,17
8	Oku Sekatan	37,92	39,50	10,53	10,85
9	Oku Timur	70,40	71,10	10,43	10,43
10	Ogan Ilir	57,06	57,97	13,31	13,36
11	Empat Lawang	30,68	31,89	12,30	12,63
12	Pali	25,47	24,17	13,47	12,62
13	Musi Rawas Utara	36,63	37,75	19,12	19,47
14	Palembang	180,67	182,60	10,90	10,89
15	Prabumulih	21,62	21,83	11,61	11,59
16	Pagar Alam	12,37	12,71	8,90	9,07
17	Lubuk Linggau	29,98	29,80	12,95	12,71
	Sumatera Selatan	1073,74	1081,59	12,71	12,66

Sumber : BPS Sumatera Selatan, 2020

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa penduduk miskin di Sumatera Selatan pada tahun 2019 mencapai 1073,74 ribu jiwa kemudian pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan mengalami peningkatan menjadi 1081,59 ribu jiwa. Usaha pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan penduduk miskin di Sumatera Selatan pada tahun 2020 adalah faktor ekonomi dan adanya wabah Covid-19 sehingga pendapatan ekonomi masyarakat mengalami penurunan pada tahun 2020.

Pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar dalam masalah pemukiman dan tempat tinggal. Hal ini dapat dilihat banyaknya program-program pro rakyat untuk menanggulangi kemiskinan melalui program perumahan swadaya, bantuan peningkatan kualitas infrastruktur pemukiman di kawasan pemukiman kumuh. Namun belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi penurunan menunjukkan program-program pemerintah telah memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan hak-hak dasar mereka.

Umumnya masyarakat mengupayakan rumah setelah kebutuhan pangan terpenuhi dan bagi sebagian masyarakat rumah dibangun secara mandiri sedikit demi sedikit secara bertahap. Rumah merupakan hak dasar terutama bagi mereka untuk membentuk keluarga yang sejahtera. Kondisi seperti ini terjadi di perkotaan khususnya rumah-rumah dibangun oleh masyarakat yang

berpenghasilan rendah. Rumah merupakan jenis kebutuhan jasmani yang tergolong pada kebutuhan primer yang bersifat material yang memerlukan pemenuhan, karena merupakan salah satu aspek kesejahteraan sosial. Hal ini berarti, pemenuhan kebutuhan rumah berpengaruh terhadap derajat kesejahteraan masyarakat. Apabila kebutuhan rumah tidak dapat terpenuhi maka masyarakat tersebut akan mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Pemenuhan kebutuhan rumah sebagai kebutuhan dasar tidak terbatas pada fungsi fisik, yaitu melindungi orang-orang di dalamnya dari ancaman dan gangguan yang berasal dari luar rumah, seperti panas, hujan, angin, dan gangguan keamanan. Akan tetapi rumah sesungguhnya memiliki fungsi non fisik, yaitu sebagai teman yang menjamin kelangsungan hidup, pelestarian nilai, norma dan pengembangan pola relasi sosial atau sosialisasi, memberikan rasa damai, nyaman, tentram, dan meningkatkan harkat dan martabat.

Memenuhi kebutuhan rumah yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebagai kebutuhan dasar manusia rumah merupakan syarat untuk memperoleh kesejahteraan. Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan berfungsi sebagai sarana pembinaan keluarga, maka kebutuhan rumah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Sudah menjadi kewajiban negara dalam rangka mensejahterakan warganya dengan membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memenuhi kebutuhan akan tempat tinggalnya.

Salah satu program Pemerintah Kota Prabumulih yang diatur dalam Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah, dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tempat tinggal yang sehat yaitu dengan melakukan program pembangunan rumah layak huni yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Prabumulih. Berdasarkan hasil data yang sudah diolah, diverifikasi, dan divalidasi oleh tim Bappeda Kota Prabumulih pada tahun 2013 terdapat sebanyak 937 data rumah tidak layak huni milik sendiri di Kota

Prabumulih. Pada tahun 2014, inisiatif Walikota pada saat itu adalah dengan mengumpulkan zakat dari para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyaluran dana dan pekerjaannya melalui Baznas Kota Prabumulih. Pada tahun 2015, para tenaga kerja Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih ikut membantu menyisihkan sebagian uangnya untuk kegiatan bangun rumah baru layak huni tersebut. Data di atas menunjukkan kemampuan pegawai dalam memberikan zakat/infak dan sadaqah setiap bulan di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih untuk membantu penentasan kemiskinan. Berikut tabel jumlah potongan gaji pegawai lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih berdasarkan golongan:

Tabel 2. Jumlah Potongan Gaji Pegawai Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2020

No	Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Potongan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Walikota dan Wakil Walikota	2	167.000,00	334.000,00
2	Golongan IV	845	127.500,00	107.737.500,00
3	Golongan III	2.835	67.500,00	191.362.500,00
4	Golongan II	738	32.500,00	23.985.000,00
5	Golongan I	27	32.500,00	877.500,00
6	Non PNS	2.860	10.000,00	28.600.000,00
	Total	7.305		352.896.500,00

Sumber: *Perwako Nomor 5 Tahun 2017*

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa pegawai Pemerintah Kota Prabumulih mendapat potongan setiap bulannya yang telah diatur dalam Perwako Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan dan Kesejahteraan Daerah. Potongan gaji pegawai tersebut disalurkan melalui Baznas Kota Prabumulih sebesar Rp352.896.500,00/bulan.

Walikota Prabumulih mempercayai Baznas Kota Prabumulih untuk mengelola dana tersebut dengan maksud Baznas Kota Prabumulih merupakan bidang yang sesuai untuk mengelola dana Zakat, Infaq, dan Sadaqoh yang dalam hal ini mengelola infaq dari potongan gaji Pegawai Pemerintah Kota Prabumulih, yang kemudian dimasukkan kedalam Perwako Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan dan Kesejahteraan daerah di dalam Pasal 7 yang

berbunyi Tunjangan Kesejahteraan Daerah dikenakan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) yang akan disetorkan kepada Baznas Kota Prabumulih.

uang tersebut digunakan untuk beasiswa berprestasi, pemberian bantuan masyarakat yang cacat fisik, bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan untuk bantuan pembangunan rumah tidak layak huni di Kota Prabumulih. Adanya program tersebut Baznas dapat melakukan pembangunan rumah tidak layak huni rata-rata 10 rumah setiap bulannya dengan jumlah dana setiap rumahnya sebesar Rp 30.111.500/rumah (sumber: wawancara bersama Kepala Baznas Kota Prabumulih, tanggal 8 Desember 2020).

Tabel 3. Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni oleh Baznas Kota Prabumulih Tahun 2017-2020

No	Tahun	Jumlah Rumah Yang Di Bangun
1	2017	118
2	2018	94
3	2019	117
4	2020	118
Total		447

Sumber: Baznas Kota Prabumulih, Tahun 2021

Dari tabel 3 dapat dilihat pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Baznas Kota Prabumulih sudah membangun rumah baru bagi masyarakat yang rumahnya tidak layak huni di wilayah Kota Prabumulih dengan total keseluruhan rumah yang dibangun berjumlah 447 rumah. Setiap tahunnya Baznas Kota Prabumulih melakukan rekomendasi untuk memperbanyak pembangunan yang dilakukan untuk setiap tahunnya dan pembagian wilayah daerah yang dibangun juga harus merata agar masyarakat Kota Prabumulih yang membutuhkan program tersebut bisa merasakan program pembangunan tersebut, sehingga program yang dilakukan tersebut bisa maksimal dan mensejahterakan masyarakat Kota Prabumulih. Pembangunan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pernah mengalami penurunan pada tahun 2018. Spesifikasi rumah yang dibangun oleh Baznas Kota Prabumulih dengan ukuran luas rumah 5 meter x 6 meter dan tinggi bangunan rumah 2,95 meter. Berdasarkan uraian di atas, Baznas memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan pemanfaatan zakat di Indonesia. Potensi zakat di

lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih mencapai Rp 4.234.758.000,00/tahun.

Program pembangunan rumah tidak layak huni merupakan upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh maupun sebagian pemugaran atau renovasi sehingga tercipta kondisi rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal. Permasalahan yang terjadi adalah pembangunan perumahan yang tidak seimbang disebabkan dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk, yang mengakibatkan tidak semua masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya akan perumahan yang telah disediakan oleh Baznas Kota Prabumulih, karena masyarakat dari golongan ekonomi lemah tidak mampu mengakses pembangunan perumahan, mencari solusi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi tidak mempertimbangkan kelayakan rumah sebagai tempat tinggal (sumber: wawancara bersama Ketua Baznas Kota Prabumulih, tanggal 8 Desember 2020). Program pembangunan rumah yang dilakukan oleh Baznas Kota Prabumulih untuk masyarakat miskin merupakan gebrakan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota Prabumulih.

Salah satu pendukung yang perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Dalam hal ini, fokus penelitian yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah rumah tidak layak huni. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian berupa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal.

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Jenis	Judul
1.	Bambang Winarno	2018	Jurnal	Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung
2	Sarimah	2016	Jurnal	Pelaksanaan Pembangunan dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014
3	Ibnu Abbas	2015	Jurnal	Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2021

Penelitian pertama, dilakukan oleh Bambang Winarno (2018) membahas tentang mengevaluasi penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Belitung, untuk mengetahui kesesuaian program dan mekanisme bantuan bagi masyarakat miskin, dan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut, bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Belitung sesuai sasaran, namun perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait pengelolaan rumah layak huni pasca pembangunan.

Peneliti kedua, dilakukan oleh Sarimah (2016) dengan fokus penelitian membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan dalam program bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Karas dengan berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau peristiwa sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut, pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni di Kelurahan Karas Tahun 2014 sudah optimal oleh penerima bantuan, namun dari proses pelaksanaan pembangunan rumah dengan adanya masalah yang timbul, instansi-instansi pemerintah yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan rumah lebih banyak memberikan masukan dan saran tanpa adanya tindakan nyata.

Peneliti ketiga, dilakukan oleh Ibnu Abbas (2015) dengan fokus penelitian untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kebijakan pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut, pembangunan rumah tidak layak huni yang dibangun bagi masyarakat miskin oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil dari segi efisiensi, hal ini dilihat dari sesuainya usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari segi biaya, waktu, dan manfaat atau hasil yang dirasakan serta diharapkan masyarakat.

Perbedaan penelitian yang akan Peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu instansi-instansi pemerintah yang

terkait dalam pelaksanaan pembangunan rumah lebih banyak memberikan masukan dan saran tanpa adanya tindakan nyata. Berbeda dengan penelitian ini instansi-instansi terkait berupaya memberikan dukungan baik berupa masukan maupun saran dengan tindakan nyata. Realitas inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti fenomena ini untuk menemukan jawabannya, maka peneliti mengangkat judul penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Prabumulih)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Evaluasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni (Studi pada Badan Amil Zakat Kota Prabumulih)?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Evaluasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Prabumulih yang di lakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Prabumulih.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berguna untuk melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung, dan diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan sedikit memberi sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang sosial.

b. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang pemerintahan khususnya dalam membuat program di bidang pemerintahan sebagai bekal untuk masuk kedalam instansi pemerintahan agar kebijakan program yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah dapat menimbulkan hasil yang positif bagi masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang Evaluasi

2.1.1. Konsep Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan (Subarsono, 2016). Evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respon mereka yang berada diluar lingkungan politik (Pasolong, 2013).

Evaluasi adalah penelitian yang sistematis atau yang teratur tentang manfaat atau guna suatu objek (Tayipnapi, 2000). Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam kebijakan (Badjuri, 2013). Jalannya proses implementasi adalah *monitoring*. Dalam proses *monitoring* ini dilakukan pengamatan langsung ke lapangan dan hasil-hasil sementara dinilai tingkat efisiensi dan efektivitasnya (Pasolong, 2013). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan evaluasi adalah usaha untuk mengukur dan memberikan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk kemudian dibandingkan dengan tujuan rencana yang telah ditetapkan.

2.1.2. Tujuan Evaluasi

Tujuan pokok evaluasi untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya

adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci (Subarsono, 2016), sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar kualitas pengeluaran atau *output* dari suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap ini lebih lanjut, evaluasi ditunjukkan untuk melihat dampak positif maupun negatif.
- e. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

2.1.3. Evaluasi Program

Menurut James R. Sanders dan Blaine R. Worthen memberikan pengertian pada dasarnya evaluasi program adalah suatu proses mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi untuk membantu para pengambil keputusan dalam memilih berbagai alternatif keputusan dalam suatu kebijakan dijalankan (Djudju Sudjana, 2006). Menurut Mugiadi evaluasi program adalah upaya mengumpulkan informasi mengenai suatu program, kegiatan, dan proyek (Djudju Sudjana, 2006). Informasi tersebut berguna bagi pengambilan keputusan, antara lain untuk memperbaiki program, menyempurnakan kegiatan program lanjutan, menghentikan suatu kegiatan, atau menyebarluaskan gagasan yang mendasari setiap pengambilan keputusan. Dari beberapa pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah program bukan hanya

kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Pelaksanaan program selalu terjadi dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan orang banyak.

Agar evaluasi program tetap memiliki kebermaknaan dalam fungsinya untuk menilai tingkat pelaksanaan dan keberhasilan suatu program, maka dalam penelitian evaluasi program perlu memiliki prinsip penting, yaitu:

- a. Jujur, merupakan prinsip pertama di mana pihak yang terlibat perlu memberikan data, keterangan atau informasi sesuai dengan kenyataan didukung dengan bentuk fisik yang mendukung.
- b. Objektif, yaitu para pihak yang terlibat mendasarkan penilaian atas dasar informasi dan kriteria yang ada dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar informasi dari kriteria yang ada.
- c. Tanggung jawab, yaitu para pihak yang terlihat memberikan data dan informasi yang benar dan nyata, serta bisa diberikan alasannya secara rasional.
- d. Transparansi, yaitu hasil evaluasi dapat dikomunikasikan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan.

Evaluasi program dapat menyajikan lima jenis informasi dasar (Djudju Sudjana, 2006), sebagai berikut:

- a. Berbagai data yang dibutuhkan untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu program harus dilanjutkan.
- b. Indikator-indikator tentang program-program yang paling berhasil berdasarkan jumlah biaya yang digunakan.
- c. Informasi tentang unsur-unsur setiap program dan gabungan antar unsur program yang paling efektif berdasarkan pembiayaan yang diberikan sehingga efisiensi pelaksanaan program dapat tercapai.
- d. Informasi untuk berbagai karakteristik sasaran program-program sehingga para pembuat keputusan dapat menentukan tentang individu,

- kelompok, lembaga atau komunitas mana yang paling menerima pengaruh pelayanan program.
- e. Informasi tentang metode-metode baru untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi pengaruh program.

2.1.4. Pendekatan Evaluasi

Evaluasi kebijakan mempunyai dua aspek yang saling berhubungan: penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik dan program dan aplikasi serangkaian nilai untuk kegunaan hasil terhadap beberapa orang, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Ada tiga jenis pendekatan dalam evaluasi (William N. Dunn, 2003), antara lain:

- a. Evaluasi semu (*Pseudo evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utamanya adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri atau tidak kontroversial.
- b. Evaluasi formal (*formal evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utamanya bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

- c. Evaluasi keputusan teoritis (*decision-theoretic evaluatin*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok evaluasi ini dengan dua jenis pendekatan di atas adalah evaluasi ini berusaha memunculkan tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau nampak.

2.1.5. Kriteria Evaluasi

Enam kriteria dalam menilai kinerja kebijakan (William N. Dunn, 2003), sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Penilaian Kinerja Kebijakan

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (Masalah tipe I) Efektivitas tetap (Masalah Tipe II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat di distribusikan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria Pareto Kriteria kaldor-Hicks Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survai warga negara
Ketepatan	Apakah hasul (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber: William N. Dunn (2003:610)

Tabel 5 dapat dilihat bahwa kriteria-kriteria di atas merupakan tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh William N. Dunn

untuk setiap kriterianya. Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Efektivitas

Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai tujuan dari diadakannya tindakan, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Pengukuran kriteria efektivitas berhubungan dengan apakah alternatif kebijakan yang digunakan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapau tujuan. Efektivitas sebagai hubungan rasional teknis yang di ukur dari hasil produk atau layanan tanpa memperhitungkan biaya. Semakin baik produk yang dihasilkan dengan meminimalisir biaya maka tingkat efektivitas mencapai tujuan dengan baik.

Alternatif kebijakan pemberian bantuan secara tepar dilakukan oleh pelaksana kebijakan melalui pemberian informasi terkait dengan program kebijakan, tujuan dari program, serta manfaat pelaksanaan program. Adapun yang menjadi latar belakang dari program pembangunan rumah layak huni di Kota Prabumulih adalah untuk mengentaskan program kemiskinan yang terjadi di Kota Prabumulih. Sebagai alternatif kebijakan pengentasan kemiskinan dengan pemberian bantuan pembangunan rumah layak huni secara langsung.

Berdasarkan maksud dari tujuan program pembangunan rumah layak huni di Kota Prabumulih adalah untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih layak dengan menempati rumah layak huni. Kualitas hidup

yang diharapkan adalah dengan kondisi rumah dan lingkungan yang bersih dan asri, tidak ada atap bocor serta dinding yang terbebas dari hewan yang mudah masuk ke dalam rumah. Selain itu, program pembangunan rumah layak huni di Kota Prabumulih merupakan program pengentasan kemiskinan dikhususkan untuk masyarakat miskin di Kota Prabumulih.

b. Efisiensi

Kriteria selanjutnya adalah efisiensi yang erat kaitannya dengan efektivitas. Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dengan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Berdasarkan pendapat di atas, maka efisiensi dapat diartikan sebagai suatu standar untuk menilai seberapa besar usaha yang dilakukan oleh pelaksana suatu kegiatan atau kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Pengukuran tingkat efisiensi pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni berdasarkan sumber dana, tim pelaksana, serta bagaimana pihak-pihak terkait dalam menjalankan program. Tingkat efisiensi untuk masyarakat penerima bantuan dapat diukur dari dampak yang dirasakan setelah berjalannya program.

Sumber dana berasal dari potongan gaji Pegawai Pemetintah Kota Prabumulih setiap bulannya yang sudah diatur dalam Perwako Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan dan Kesejahteraan

Daerah. Selain sumber dana yang jelas, untuk sumber daya manusia (SDM) sebagai tim pelaksana telah terkoordinasi dengan dibentuknya tim panitia pembangunan disetiap kelurahan di Kota Prabumulih. Sumber daya manusia sebagai tim pelaksana dibentuk untuk mendukung berjalannya program pembangunan rumah layak huni yang didukung oleh SKPD terkait sebagai tim panitia yang mengkoordinir, mengawasi, melaksanakan serta mengevaluasi berjalannya program agar sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.

Kriteria keberhasilan program pembangunan rumah layak huni ini juga tidak lepas dari strategi yang diterapkan oleh pelaksana program. Strategi yang diterapkan salah satunya adalah melalui sosialisasi tentang program pembangunan rumah layak huni disetiap kelurahan. Strategi lain adalah dengan memberikan kualitas bangunan yang sesuai standar dalam rencana program pembangunan rumah layak huni.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam konteks kebijakan publik dapat diartikan bahwa tujuan yang telah dicapai setelah pelaksanaan kebijakan tersebut dirasakan sudah dapat menyelesaikan masalah yang terdapat pada objek kebijakan tersebut. William N. Dunn berpendapat bahwa kecukupan berarti seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kecukupan memiliki hubungan dengan efektivitas yang memprediksi jauh tidaknya alternatif kebijakan yang ada, dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Dalam program pembangunan rumah layak huni yang dilakukan oleh Baznas

Kota Prabumulih dibuktikan dengan anggaran dana Rp30.111.500,00/rumah. Bantuan yang diterima oleh penerima disalurkan dalam bentuk rumah yang dimana penerima langsung menerima rumah dalam bentuk jadi. Tidak hanya pada bagaimana pencapaian sasaran dengan biaya tertentu, melainkan juga dilihat dari bagaimana strategi dan mekanisme yang diterapkan mampu melaksanakan program dengan baik.

d. Perataan

Kriteria perataan adalah keadilan yang sama diberikan oleh sasaran kebijakan. Ruang lingkup perataan dalam program pembangunan rumah layak huni merupakan wilayah dari ruang lingkup yang berada di Kota Prabumulih. Kota Prabumulih terdapat 37 desa atau kelurahan dan terdapat 6 kecamatan. Ada program pembangunan rumah layak huni, Pemerintah Kota Prabumulih mengintruksikan kepada seluruh kepala desa maupun kelurahan yang ada di Kota Prabumulih tanpa terkecuali untuk mengusulkan masyarakat atau warga dari desa maupun kelurahannya yang rumahnya milik sendiri tetapi tidak layak untuk dihuni, untuk dapat diusulkan pada program pembangunan rumah layak huni. Sehingga pembangunan rumah layak huni di Kota Prabumulih dilakukan secara merata pada wilayah Kota Prabumulih

Mekanisme untuk mendapatkan bantuan program pembangunan rumah layak huni tergolong mudah, yaitu dimulai dari pihak kelurahan/desa yang melakukan pengajuan proposal bantuan dilihat dari mata pencaharian, tingkat pendapatan serta foto kondisi rumah masyarakat yang kemudian di serahkan kepihak kecamatan. Kemudian pihak kecamatan menyerahkan proposal tersebut sesuai dengan syarat-syarat penerima bantuan untuk diserahkan kepada pihak Baznas Kota Prabumulih. Kemudian Baznas Kota Prabumulih

melakukan proses seleksi proposal, setting gambar, verifikasi sasaran serta meninjau lokasi rumah yang akan dibangun.

e. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai anggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut Willian N. Dunn, responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Berdasarkan konsep di atas, kriteria responsivitas mengarah kepada kepuasan yang didapat oleh masyarakat yang dianggap menguntungkan dengan adanya kebijakan. Selama berjalannya program tentunya ada masyarakat yang menerima maupun yang menolak adanya program pembangunan rumah layak huni tersebut. Berbagai respon positif maupun negatif masyarakat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan atau gagalnya program kebijakan. Sebuah responsivitas didapat berdasarkan bagaimana pihak tim pelaksana dalam mensosialisasikan program pembangunan rumah layak huni dan proses pengajuan proposal bantuan oleh kelurahan/desa ke Baznas Kota Prabumulih.

f. Ketepatan

Kriteria Ketepatan mengenai evaluasi kebijakan merujuk pada apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai untuk kelompok sasaran. Suatu program yang sedang atau sudah berjalan akan menghasilkan suatu produk yang bermanfaat. Ketepatan dalam program pembangunan rumah layak huni di Kota Prabumulih dinilai berhasil apabila tepat pada sasaran serta ketepatan

dalam proses pembangunan atau perbaikan rumah yang tidak layak huni. Adapun tolak ukur ketepatan dalam program pembangunan rumah layak huni di Kota Prabumulih, yaitu:

- a. Masyarakat yang berpenghasilan rendah, salah satu syarat untuk menerima bantuan pembangunan rumah layak huni di Kota Prabumulih yang di laksanakan oleh Baznas Kota Prabumulih adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah yang memiliki rumah sendiri tetapi rumah tersebut tidak layak huni, karena banyak masyarakat yang menempati rumah merupakan masyarakat kurang mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. Masyarakat yang memiliki rumah dengan kondisi tidak layak huni, dengan adanya program pembangunan rumah layak huni, dapat membantu masyarakat yang memiliki rumah sendiri tetapi tidak layak untuk dihuni, memperbaiki dan merenovasi rumah mereka menjadi rumah layak huni. Masyarakat yang memiliki rumah dengan kondisi tidak layak huni akan mendapatkan bantuan pembangunan rumah layak huni yang dilakukan oleh Baznas Kota Prabumulih.

2.2. Konsep Pembangunan

Pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal di Indonesia. Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan materil. Pembangunan diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sekelompok masyarakat di bidang ekonomi. Pembangunan sering dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi.

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Setiap orang atau kelompok orang tertentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau berkembang (Subandi. 2009).

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu, pembangunan menurut Rogers (Rochajat, 2013) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya, menurut W.W Rostow pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Pembangunan adalah upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan masyarakat modern. Maka tidak ada satu negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan (Siagian 2005).

Selanjutnya langkah-langkah di dalam mengajak peran serta masyarakat secara penuh di dalam pembangunan dapat dilakukan dengan jalan:

1. Merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang akan mewujudkan melalui upaya pembangunan
2. Dengan dibantu oleh pendamping atau narasumber atau lembaga advokasi masyarakat, dibuat alternatif perumusan dari berbagai keinginan tersebut.
3. Merancang pertemuan seluruh masyarakat yang berminat dan berkepentingan yang membicarakan cost dan benefit dari pelaksanaan pembangunan ini.
4. Proses perencanaan program pembangunan dan pembiayaan pembangunan serta rencana pelaksanaan pembangunan dilangsungkan beberapa kali dan melibatkan seluruh instansi dan maupun pameran pembangunan yang

terkait. Melakukan program pembangunan disertai dengan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan sangat menentukan tercapainya hasil perencanaan yang baik. Karena masyarakat sebagai unsur dalam pembangunan tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang dibutuhkan. Disamping masyarakat seharusnya diberi kepercayaan oleh pemerintah dalam pembangunan, sehingga mereka merasa bertanggung jawab dan merasa memiliki program pembangunan tersebut.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya (Rochajat Harun, dkk, 2013).

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok, yang pertama masalah materi yang ingin dihasilkan dan dibagi, dan yang kedua masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia. Manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut.

2.3. Rumah Layak Huni

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman disebutkan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Terkait dengan fasilitas-fasilitas yang akan diperbaiki dari program pembangunan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, bahwa rumah layak huni harus mempunyai fasilitas-fasilitas.

Pertama penyediaan air bersih yang cukup, pembuangan tinja, pembuangan limbah (air bekas), pembangunan sampah, fasilitas dapur, ruang berkumpul dengan keluarga dan untuk rumah diperdwsaan lebih cocok adanya serambi (serambi depan dan belakang). Dan untuk yang memiliki ternak, sebaiknya antara rumah dengan kandang ternak jaraknya harus terpisah untuk menjaga kesehatan.

Menurut Depkes RI (2002), rumah harus memenuhi empat kriteria agar bisa dikatakan sehat yaitu:

1. Dapat memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu.
2. Dapat memenuhi kebutuhan psikologis antara lain privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antara anggota keluarga dan penghuni rumah
3. Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas dari penyakit dan tikus, kepadatan hunia yang berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan penghawaan yang cukup.
4. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun keadaan dalam rumah, antara lain: posisi garis sepadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar dan tidak cendrung membuat penghuninya jatuh tergelincir

2.4. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Rumah tidak layak huni selalu berkaitan dengan aspek kemiskinan karena keterjangkauan daya beli masyarakatnya terhadap rumah. Adapun sembilan kriteria khusus yang dikatakan sebagai rumah tidak layak huni, yaitu:

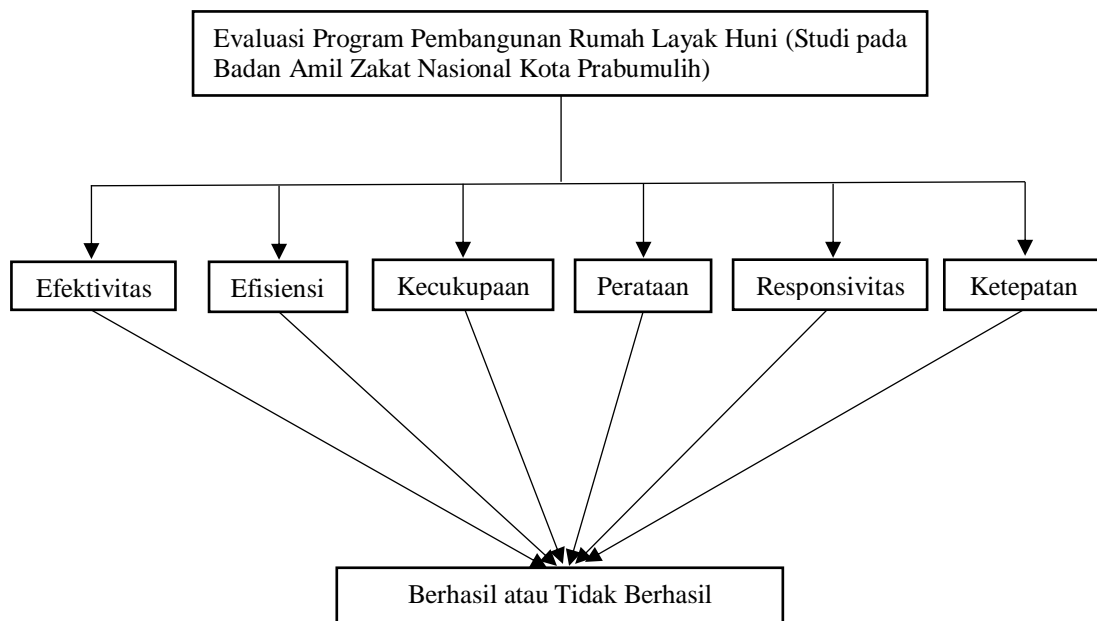
1. Luas lantai per kapita kota kurang dari empat meter persegi (4 m²), desa kurang dari sepuluh meter persegi (10 m²).
2. Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas.
3. Tidak ada akses MCK.
4. Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, papan, rumbia.
5. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara.
6. Tidak memiliki pembagian ruangan.
7. Lantai dari papan bahan tidak permanen ataupun lantai dari tanah.
8. Letak rumah tidak teratur dan berdempetan.
9. Kondisi rusak, ditambah lagi dengan saluran pembuangan air yang tidak memenuhi standar.

2.5. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran yang diambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan judul penelitian dalam upaya menjawab permasalahan yang ada di rumusan masalah penelitian. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana evaluasi Pemerintah Kota Prabumulih terhadap pembangunan rumah layak huni yang dilakukan oleh Baznas Kota Prabumulih. Dalam upaya menjawab permasalahan evaluasi Pemerintah Kota Prabumulih terhadap pembangunan rumah layak huni yang dilakukan oleh

Baznas Kota Prabumulih, maka peneliti memilih teori evaluasi menurut William N. Dunn.

Menurut William N. Dunn, dalam mengevaluasi kebijakan ada enam dimensi yang bisa diukur yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Adapun kerangka pikir yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:



Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Metode Penelitian Kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Beberapa ahli metodologi seperti Kirk dan Miller (Moleong, 2007), mendefinisikan metode kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Miles dan Huberman mengemukakan metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tujuan dari metodologi ini bukan sesuatu yang umum, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. Dari penjelasan yang dikemukakan di atas, maka metode yang digunakan sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni metode kualitatif, mengenai

“Evaluasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Prabumulih)”.

3.2. Fokus Penelitian

Peneliti kualitatif harus menetapkan fokus. Fokus penelitian yang dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan agar tidak dimasukkan kedalam data yang sedang dikumpulkan, walaupun data itu menarik (Moleong, 2007). Fokus penelitian ini adalah pembatasan masalah dalam penelitian berisikan pokok dari masalah yang masih bersifat umum. Agar permasalahan tidak terlalu luas, maka peneliti akan membatasi satu atau lebih variabel.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yang telah dijelaskan dalam kerangka pikir penelitian, yaitu evaluasi Pemerintah Kota Prabumulih terhadap pembangunan rumah layak huni yang dilakukan oleh Baznas Kota Prabumulih menggunakan teori model evaluasi William N. Dunn, yaitu:

a. Efektivitas

1. Pengumpulan dana oleh Baznas Kota Prabumulih untuk pelaksanaan pembangunan rumah layak huni.
2. Kesesuaian antara hasil dan tujuan dari pembangunan rumah layak huni.

b. Efisiensi

1. Proses sosialisasi Baznas Kota Prabumulih kepada masyarakat.
2. Kualitas bangunan yang diberikan Baznas Kota Prabumulih kepada masyarakat yang menerima bantuan.

c. Kecukupan

1. Jumlah dana yang diberikan Baznas Kota Prabumulih kepada masyarakat penerima bantuan rumah layak huni.
2. Jangka waktu pelaksanaan pembangunan rumah

d. Perataan

1. Pembagian wilayah rumah yang dibangun.
2. Tahapan seleksi dalam menentukan calon penerima program.

e. Responsivitas

1. Persepsi masyarakat terhadap proses dan tahapan pelaksanaan.
2. Persepsi Pegawai ASN dan Non ASN terhadap potongan gaji setiap bulan.

f. Ketepatan

1. Masyarakat yang berpenghasilan rendah.
2. Masyarakat memiliki rumah dengan kondisi tidak layak huni.

3.3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian cara baik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sementara itu keterbatasan geografis dan praktis, seperti biaya, waktu, dan tenaga juga perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Prabumulih.

Alasan pemilihan Baznas Kota Prabumulih sebagai lokasi penelitian memiliki beberapa pertimbangan. Pertama, adalah unsur keterjangkauan lokasi penelitian oleh Peneliti baik dilihat dari segi tenaga, dana maupun efisiensi waktu. Pelaksanaan penelitian di lokasi yang terpilih tidak menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan kemampuan tenaga Peneliti. Kedua, alasan Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena program yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Prabumulih sangat menarik, sehingga peneliti ingin mengetahui secara lebih mendalam bagaimana proses pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Prabumulih.

3.4. Informan

Informan dari penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2015). *Purposive Sampling* digunakan untuk mencapai keterwakilan dari *setting*, individu-individu dan aktivitas-aktivitas yang dipilih. Alasan pemakaian teknik *Purposive Sampling* karena informan penelitian ini dinilai memiliki kriteria tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut, pada penelitian ini informan yang dipilih adalah mereka yang dipandang cukup memahami permasalahan yang berhubungan dengan evaluasi program pembangunan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Prabumulih dan orang yang dianggap dapat memberikan data, informasi atau fakta terkait dengan program pembangunan rumah layak huni ini. Adapun informan yang akan dijadikan sebagai sumber informasi penelitian ini adalah:

Tabel 6. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Status/Jabatan
1	H. Nadjamuddin Said	Ketua Baznas Kota Prabumulih
2	H. Ibnu Hajar.S	Koordinator Pembangunan Baznas Kota Prabumulih
3	Sumadi	Tim Verifikasi Lapangan Baznas Kota Prabumulih
4	Ade Sunandar	Pegawai ASN Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat
5	Afridayati	Pegawai Honorer Bagian Umum Kota Prabumulih
6	Sugeng	Masyarakat
7	Lisna Neli	Masyarakat

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2021

3.5. Jenis Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan pustaka yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-

bahan pustaka yang umumnya dinamakan data sekunder (Soejono Soekanto, 1999)

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan wawancara yang dilakukan dengan responden yang sesuai dengan panduan wawancara yang dibuat oleh Peneliti. Data primer diperoleh Peneliti sebagai hasil dari proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam dan observasi mengenai program pembangunan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Prabumulih.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas yang berkaitan dengan pokok penelitian.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang benar dan akurat menggunakan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam komunikasi langsung berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan

(Silaen dan Widiyono, 2013). Penelitian ini, melakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh data dari informan terkait dengan fokus penelitian, sehingga sasaran yang akan diwawancarai adalah pihak yang terkait dengan permasalahan yang dijadikan sumber data.

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan terlebih dahulu menentukan sejumlah informan. Sesuai dengan tujuan Peneliti untuk memperoleh data mengenai program pembangunan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Prabumulih. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu proses wawancara dengan menggunakan panduan wawancara yang sudah disiapkan berupa tanya jawab antara Peneliti dan informan mengenai program pembangunan rumah layak huni.

Tabel 7. Waktu Pelaksanaan Wawancara

No	Nama	Status/Jabatan	Pelaksanaan Wawancara
1	H. Nadjamudin Said	Ketua Baznas Kota Prabumulih	Jum'at, 2 Juli 2021
2	H. Ibnu Hajar.S	Koordinator Pembangunan Baznas Kota Prabumulih	Jum'at, 2 Juli 2021
3	Sumadi	Tim Verifikasi Lapangan Baznas Kota Prabumulih	Senin, 5 Juli 2021
4	Ade Sunandar	Pegawai ASN Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat	Selasa, 6 Juli 2021
5	Afridayati	Pegawai Honorer Bagian Umum Kota Prabumulih	Selasa, 6 Juli 2021
6	Sugeng	Masyarakat	Sabtu, 10 Juli 2021
7	Lisna Neli	Masyarakat	Sabtu, 10 Juli 2021

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2021

Peneliti melakukan wawancara kepada responden mulai tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan 10 Juli 2021. Pada tanggal 2 Juli 2021 Peneliti melakukan wawancara di Kantor Baznas Kota Prabumulih. Pertama, Peneliti melakukan wawancara secara langsung bersama Ketua Baznas Kota Prabumulih Bapak H. Nadjamudin Said. Setelah wawancara bersama Ketua Baznas Kota Prabumulih Peneliti melakukan wawancara Bersama Koordinator Pembangunan Baznas Kota Prabumulih Bapak H. Ibnu Hajar.S secara langsung. Peneliti melakukan wawancara kepada kedua responden tersebut untuk menanyakan tentang program Baznas Kota Prabumulih yang

salah satunya program pembangunan rumah layak huni. Peneliti juga menyiapkan beberapa pertanyaan untuk responden. Kemudian pertanyaan dan hasil wawancara tersebut terlampir di lampiran.

Tanggal 5 Juli 2021 Peneliti kembali melakukan wawancara bersama Tim Verifikasi Lapangan Baznas Kota Prabumulih yang salah satunya bersama Bapak Sumadi. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Sumadi di Kantor Baznas Kota Prabumulih. Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan kepada responden untuk menanyakan tentang proses pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni tersebut mulai dari sosialisasi sampai dengan proses seleksi masyarakat yang menerima bantuan program pembangunan rumah layak huni. Untuk pertanyaan dan hasil wawancara bersama responden terlampir di lampiran.

Peneliti melakukan wawancara bersama pegawai ASN dan honorer Pemerintah Kota Prabumulih pada tanggal 6 Juli 2021 bersama Bapak Ade Sunandar dan Ibu Afridayati. Wawancara dilakukan untuk menanyakan tanggapan atau respon dari pegawai Pemerintah Kota Prabumulih dengan adanya potongan gaji pegawai baik ASN maupun Non ASN untuk pelaksanaan program yang dilakukan oleh Baznas Kota Prabumulih. Adapun pertanyaan dan hasil wawancara yang dilakukan Peneliti terlampir di lampiran.

Kemudian Peneliti melakukan wawancara bersama masyarakat yang mendapatkan bantuan program pembangunan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Prabumulih dengan Bapak Sugeng dan Ibu Lisna Neli pada tanggal 10 Juli 2021. Peneliti menanyakan tentang responsivitas dengan adanya program pembangunan rumah layak huni tersebut dan mereka berhak mendapatkan bantuan tersebut. Peneliti juga melihat respon mereka yang mendapatkan bantuan tersebut merasa sangat senang karena merasa sangat terbantu dan dipedulikan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Adapun pertanyaan dan hasil wawancara bersama responden yang dilakukan peneliti terlampir di lampiran.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis, dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi (Widi, 2010). Teknik observasi dibagi menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan non partisipan. Suatu observasi disebut observasi partisipan jika orang yang mengadakan observasi ikut ambil bagian dalam kehidupan di lapangan.

Penelitian ini menggunakan observasi partisipan yaitu Peneliti ikut serta dalam kegiatan, Peneliti hanya berperan mengamati proses kegiatan dan ikut dalam kegiatan untuk melihat proses pembangunan tersebut. Adapun terkait dengan observasi yang Peneliti lakukan yaitu mengamati secara langsung dari hasil program pembangunan rumah layak huni yang dilakukan oleh Baznas Kota Prabumulih.

Pada kegiatan observasi ini, Peneliti melihat langsung proses pembangunan rumah yang dilakukan oleh Baznas Kota Prabumulih. Peneliti melakukan observasi bertujuan untuk melihat dan membandingkan secara langsung hasil yang ada di lapangan dengan hasil wawancara dengan responden tentang program pembangunan tersebut. Di lapangan peneliti menemukan perbedaan salah satunya waktu pelaksanaan pembangunan pada saat wawancara dikatakan pembangunan satu rumah waktu pelaksanaannya 12 hari, namun ada beberapa rumah yang sedang dibangun tetapi waktu pelaksanaannya sudah lebih dari 12 hari namun rumah tersebut belum selesai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah peninggalan tertulis mengenai data berbagai kegiatan atau kejadian dari suatu organisasi yang dari segi waktu belum lama terjadi

(Silaen dan Widiyono, 2013). Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan teknik bantu dalam pengumpulan data. Dokumen yang didapatkan Peneliti dalam penelitian yaitu proses seleksi yang dilakukan Baznas Kota Prabumulih yang dilakukan dengan wawancara, data Standar Operasional Pekerjaan (SOP) rumah yang layak mendapatkan bantuan, dan foto rumah yang sudah dibangun.

Dokumentasi yang didapatkan peneliti untuk memperkuat hasil penelitian yang berhubungan dengan program pembangunan rumah layak huni ini adalah Standar Operasional Pekerjaan (SOP) kriteria masyarakat dan rumah yang layak untuk dibangun, sosialisasi Tim Verifikasi Lapangan kepada masyarakat, seleksi penerima calon bantuan program rumah layak huni, dan surat pernyataan bagi masyarakat yang menerima bantuan tersebut.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Editing Data

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten, dan lengkap. Pada tahap ini, data yang tidak bernilai atau tidak relevan harus dipisahkan. Peneliti melakukan kegiatan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang relevan. Data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data lain sehingga memiliki keterkaitan informasi.

Dalam proses editing data, Peneliti mengolah data hasil kegiatan wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada pedoman wawancara dan menentukan daya-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

b. Interpretasi Data

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat narasi dan deskriptif.

Pada proses ini, peneliti melakukan pencarian makna dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan informan. Hasil wawancara yang telah memiliki makna dianalisis sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti juga memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penulisan dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2014). Penelitian ini menggunakan tiga kegiatan analisis data yang terdapat dalam model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014) yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi data yang dianggap relevan yang telah didapat dari hasil penelitian. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam menganalisis data yang terkumpul dari catatan yang didapat di lapangan.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan pada hasil wawancara dengan informan yang berkompeten dan memiliki kapasitas serta memahami tentang program Baznas Kota Prabumulih dalam melakukan kegiatannya yang salah satunya program pembangunan rumah layak huni. Data dari hasil wawancara kemudian dipilah agar dapat disajikan dengan baik kemudian peneliti melakukan reduksi data kembali pada tahap pembahasan dan hasil.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan dalam proses penelitian ini. Penyajian yang sering digunakan pada penelitian kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpecah-pecah, bagian demi bagian dan bukan simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan.

Penyajian data dalam penelitian ini, Peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari penelitian yang akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Peneliti akan menyajikan data yang telah direduksi. Adapun data yang disajikan dalam penelitian ini adalah Evaluasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Prabumulih).

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek penelitian. Dengan demikian kesimpulan dalam

penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang sudah tercantum sebelumnya pada bagian bab pendahuluan Peneliti.

Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan. Peneliti mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Peneliti menganalisa data dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan pada penarikan kesimpulan.

3.9. Teknik Validasi Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007). Penelitian ini menggunakan teknis keabsahan data melalui proses triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembandingan terhadap data itu.

Pada bagian ini peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan keselarasan antara data yang didapatkan di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara diperkuat oleh data yang diperoleh dari dokumentasi dan observasi.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kota Prabumulih

4.1.1. Letak Geografis

Kota Prabumulih merupakan kota yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2001. Merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim. Kota Prabumulih terletak antara $3^{\circ} - 4^{\circ}$ LS dan $104^{\circ} - 105^{\circ}$ BT dengan ketinggian rata-rata 51- 54 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kota Prabumulih adalah 434,46 km².

Akhir tahun 2015, wilayah administrasi Kota Prabumulih terdiri dari 6 wilayah kecamatan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2007. Luas daratan masing-masing Kecamatan, yaitu: Rambang Kapak Tengah (73,34 km²), Prabumulih Timur (134,00 km²), Prabumulih Selatan (96,78 km²), Prabumulih Barat (61,34 km²), Prabumulih Utara (11,04 km²), dan Cambai (58,96 km²).

Kota Prabumulih merupakan suatu daerah Tingkat II yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2007, Kota Prabumulih dibagi menjadi enam kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Rambang Kapak Tengah terdiri dari 9 desa/kelurahan.
- b. Kecamatan Prabumulih Timur terdiri dari 8 kelurahan.
- c. Kecamatan Prabumulih Selatan terdiri dari 4 Kelurahan.

- d. Kecamatan Prabumulih Barat terdiri dari 6 desa/kelurahan.
- e. Kecamatan Prabumulih Utara terdiri dari 5 kelurahan.
- f. Kecamatan Cambai terdiri dari 5 desa/kelurahan.

Secara keseluruhan, Kota Prabumulih terdiri dari 37 desa/kelurahan. Prabumulih pada tahun 2015 masing-masing sebanyak 47 dusun, 139 Rukun Warga (RW) dan 538 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas wilayah Kota Prabumulih, yaitu:

- a. Batas Utara: Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- b. Batas Timur: Kecamatan Lembak dan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.
- c. Batas Selatan: Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim.
- d. Batas Barat: Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim.

4.1.2. Lambang Kota Prabumulih



Sumber: <https://www.kotaprabumulih.go.id/new/simbol-daerah/>

Gambar 2. Lambang Kota Prabumulih

Pada gambar 2 di atas terdapat arti dan makna dari simbol Kota Prabumulih yaitu sebagai berikut:

- a. 7 buah kasau: melambangkan kesatuan umat adat dan belido.
- b. Timbangan di bawah payung: melambangkan keseimbangan antara pembangunan fisik dan moral.
- c. 6 lekukan atap payung: melambangkan nomor UU pembentukan Kota Prabumulih (UU No. 6 Tahun 2001).
- d. Motto Prabumulih Jaya: menandakan semangat masyarakat Kota Prabumulih untuk mencapai adil, makmur, sejahtera dan bersatu.
- e. 21 lembar daun nanas di bagian atas buah nanas dan 6 lembar daun nanas di bagian bawah, diapit oleh 17 butir padi dan 10 buah kapas, serta angka 2001 dalam ikatan pita: melambangkan bahwa Undang-Undang pembentukan Kota Prabumulih Nomor 6 tahun 2001 bulan Juni dan di resmikan tanggal 17 Oktober Tahun 2001.
- f. 4 pilar yang mengapit Sake Payung Pusaka Adat Kota Prabumulih yang disakralkan: menandakan jumlah Kecamatan di Kota Prabumulih.
- g. Tulisan Seinggok Sepemunyan berwarna putih: menandakan kebhineka tunggal ikaan masyarakat Kota Prabumulih.
- h. Lambang berbentuk jantung berwarna hijau: menandakan kesuburan dan Kota Prabumulih adalah jantung Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di pertigaan jalan raya dan jalur lintas kereta api yang menghubungkan Palembang-Lampung.
- i. Di bawah pilar penyanggah terdapat 2 aliran sungai yang berwarna biru: melambangkan Kota Prabumulih dialiri oleh 2 sungai, yaitu Sungai Rambang dan Sungai Kelerkar, di bawah 2 aliran sungai tersebut terdapat 1 aliran sungai berwarna coklat, melambangkan Kota Prabumulih kaya akan minyak dan gas bumi.

4.1.3. Visi dan Misi Kota Prabumulih

a. Visi

Terwujudnya Kota Prabumulih sebagai Kota PRIMA (Prestasi, Religium, Inovatif, Mandiri, Aman) dan Berkualitas.

b. Misi

1. Mewujudkan peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur dalam tata pemerintahan yang baik, demokratis, inovatif, *entrepreneurship*, berprestasi, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas masyarakat Kota Prabumulih yang madani (produktif, sehat, cerdas, mandiri, religius, bermoral, beretika, berbudaya, dan berwawasan lingkungan).
3. Mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat Kota Prabumulih yang handal dan merata melalui perdagangan dan jasa.
4. Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah guna memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat.

4.2. Baznas Kota Prabumulih

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan Sadaqoh (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Baznas dinyatakan sebagai pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Baznas bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang

berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Baznas menjalankan empat fungsi, antara lain:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk berjalannya tugas dan fungsi tersebut, Baznas memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota, dan LAZ.
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sodaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas Provinsi dan LAZ.

Adapun Visi dan Misi Baznas Kota Prabumulih, yaitu:

a. Visi

Menjadikan Baznas Kota Prabumulih sebagai pusat pengelola dan pendayagunaan zakat untuk kemaslahatan dan juga pemberdayaan umat yang berlandaskan pada prinsip profesional, amanah dan transparan.

b. Misi

1. Melaksanakan secara proaktif pengumpulan zakat di Kota Prabumulih sesuai ketentuan syariah.
2. Mendistribusikan dana zakat yang telah terkumpul kepada mistahiq secara profesional dan memperhatikan skala prioritas.
3. Pendayagunaan zakat secara produktif untuk kemaslahatan dan pemberdayaan ekonomi umat.
4. Melaksanakan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat.

Adapun Struktur Organisasi Baznas Kota Prabumulih, yaitu:

- Dewan Pembina :
1. Walikota Prabumulih
 2. Wakil Walikota Prabumulih
 3. Sekretaris Daerah Kota Prabumulih
 4. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Prabumulih
 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Prabumulih
 6. Kepala Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Prabumulih

Ketua : H. Nadjamuddin Said

Satuan Audit Internal : H. Azhari H. Harun

Wakil Ketua I : H. Ibnu Hajar.S

Anggota : Herman Tanjung
Sumadi

Wakil Ketua II : H. Intisar Usmaan

Anggota : Ade Sunandar
Shobirin

Wakil Ketua III : H. Zulkifli. N

Anggota : Afridayati
Muammar Afridal

Kebijakan yang melandasi tentang pembangunan rumah layak huni di Kota Prabumulih yang dilakukan oleh Baznas Kota Prabumulih terdapat pada Perwako No 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah Pasal 7 yang berbunyi:

Tunjangan Kesejahteraan Daerah dikenakan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) yang akan disetorkan kepada Baznas Kota Prabumulih, adapun besaran potongan Baznas sebagai berikut:

- a. Walikota/Wakil Walikota dikenakan potongan Baznas sebesar Rp167.000,00 (Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)/bulan.

- b. Golongan IV dikenakan potongan Baznas sebesar Rp127.500,00 (Seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)/bulan.
- c. Golongan III dikenakan potongan Baznas sebesar Rp67.500,00 (Enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)/bulan.
- d. Golongan II dan I dikenakan potongan Baznas sebesar Rp32.500,00 (Tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)/bulan.

Adapun syarat masyarakat yang mendapatkan program pembangunan rumah layak huni yang telah ditetapkan oleh Baznas Kota Prabumulih yaitu:

- a. Masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. Tidak ada akses MCK.
- c. Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, papan, dan rumbia.
- d. Lantai dari bahan yang tidak permanen atau lantai dari tanah.
- e. Tidak memiliki pencahayaan matahari atau ventilasi udara.
- f. Status kepemilikan rumah dan tanah harus milik sendiri.

Dari syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Baznas Kota Prabumulih, masyarakat yang memenuhi seluruh syarat tersebut dinyatakan mendapatkan bantuan pembangunan. Kemudian yang menjadi poin penting dalam penilaian syarat yaitu status kepemilikan tanah dan penghasilan. Setelah itu, pihak Baznas Kota Prabumulih melalui Tim Verifikasi Lapangan melakukan penyeleksian sesuai dengan berkas yang masuk dari Kepala Desa atau Kelurahan. Untuk proses pengerjaan pembangunan, Baznas Kota Prabumulih memprioritaskan sesuai dengan berkas yang masuk terlebih dahulu dan dinyatakan lolos mendapat bantuan program pembangunan rumah layak huni.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Setelah menganalisis dari hasil pembahasan yang diteliti oleh Peneliti, terkait Evaluasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Prabumulih), dapat ditemukan bahwa program pembangunan rumah layak huni oleh Baznas Kota Prabumulih dilihat dari setiap aspek-aspek penelitian, sebagai berikut:

- a. Efektivitas, dalam hal pengumpulan dana dari seluruh pegawai sampai disetorkan ke Baznas Kota Prabumulih sudah efektif, dimana setiap elemen dari Pemerintah Kota Prabumulih, Baznas Kota Prabumulih, dan masyarakat saling bekerjasama dalam melaksanakan pembangunan rumah layak huni.
- b. Efisiensi, pelaksanaan sosialisasi oleh Baznas Kota Prabumulih bersama kepala desa dan kelurahan di Kota Prabumulih terlihat efisien, dilihat dari berbagai upaya seperti melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat bekerja sama dengan Kepala Desa/Kelurahan setempat, berkoordinasi dan komunikasi dengan baik, dan memaksimalkan kualitas bangunan rumah yang diberikan kepada masyarakat.
- c. Kecukupan, biaya yang diberikan Baznas Kota Prabumulih dalam pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni ini tergolong cukup dikarenakan masyarakat yang menerima bantuan pembangunan rumah layak huni tidak perlu lagi menambah biaya sendiri dan masyarakat terima bersih ketika rumah selesai dan langsung menerima kunci dan jangka waktu pembangunan memakan waktu 12 hari pengerjaan namun yang masih terjadi permasalahan tempat tinggal masyarakat selama 12 hari yang rumahnya sedang dibangun Baznas Kota Prabumulih di luar tanggung

- jawab pihak pelaksana, melainkan masyarakat mencari sendiri tumpangan ke tempat saudara, kerabat ataupun tetangga serta pembangunan rumah juga melebihi estimasi waktu yang sudah diberikan karena beberapa faktor alam.
- d. Perataan, pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni sudah dilaksanakan secara merata di wilayah kecamatan yang ada di Kota Prabumulih terlihat dari sudah terlaksanannya pembangunan rumah layak huni di Kecamatan Prabumulih Timur, Prabumulih Barat, Prabumulih Utara, Prabumulih Selatan, Rambang Kapak Tengah, dan Cambai, serta tahapan seleksi sudah berjalan cukup baik dilihat dari tahapan seleksi yang dilakukan oleh Baznas Kota Prabumulih namun ada kendala dalam mengunggu antrian pembangunan bagi masyarakat yang rumah nya mendapatkan bantuan, antrian untuk pembangunan tersebut kurang lebih memakan waktu 1 bulan, jadi masyarakat menunggu rumahnya untuk dibongkar dan dibangun menunggu waktu kurang lebih 1 bulan.
 - e. Responsivitas, persepsi dari masyarakat maupun pegawai ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih sudah baik, namun ada masyarakat yang mendapat bantuan mengeluh dengan lamanya menunggu antrian untuk rumah nya direhab oleh Baznas Kota Prabumulih.
 - f. Ketepatan, Baznas Kota Prabumulih sudah berhasil memilih dan menyeleksi masyarakat penerima bantuan program pembangunan rumah layak huni karena sesuai dengan syarat dan kriteria dari program pembangunan rumah layak huni oleh Baznas Kota Prabumulih.

Berdasarkan keenam aspek penting di dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa program pembangunan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Prabumulih dikategorikan berhasil. Namun, masih ada kekurangan dan belum maksimal dalam teknis estimasi waktu yang seperti estimasi waktu pengerjaan rumah masyarakat yang mendapat bantuan, waktu tunggu antrian rumah untuk dikerjakan, dan tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang rumahnya sedang dibangun.

6.2. Saran

Dari hasil penelitian di lapangan mengenai evaluasi pembangunan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Prabumulih, Peneliti memberikan beberapa saran yang dapat menjadi masukan agar dalam program pembangunan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Prabumulih kedepannya menjadi lebih baik terutama dalam teknis estimasi waktu. Adapun saran tersebut yaitu:

1. Diharapkan Baznas Kota Prabumulih memberikan tanggungan tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan program pembangunan rumah layak huni, dengan memanfaatkan Rusunawa yang dibangun oleh Pemerintah Kota Prabumulih sehingga masyarakat tidak lagi mencari tempat tinggal sementara selama rumahnya sedang dalam proses pembangunan.
2. Diharapkan dalam proses pengerjaan rumah, Baznas Kota Prabumulih harus menyelesaikan proses pembangunan tersebut tepat waktu sesuai dengan estimasi waktu yang sudah diberikan selama 12 hari dan harus menyiapkan solusi jika ada faktor penghambat dalam proses pembangunan.
3. Diharapkan Baznas Kota Prabumulih lebih sigap dalam proses antrian menunggu giliran pengerjaan rumah bagi masyarakat yang rumahnya lolos dalam seleksi bantuan program pembangunan rumah layak huni.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ibnu. 2015. *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Paradigma Vol 4 No. 2
- Anggraini, Bintari Laras & Badrudin Kurniawan. 2021. *Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tuban*. Jurnal Publika Vol 9 No. 2 (309-322)
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2020. *Provinsi Sumatera Selatan Bentuk Angka 2020: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan*
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010
- Dunn, William. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Harun, Rochajat, Dkk. 2013. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ismowati, Mary & Ahmad Subhan. 2018. *Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Pandegelang*. Jurnal Transparansi Vol 1 No. 2
- Lincoln, Arsysad. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Moelong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sam F, Poli. 2005. *Memberdayakan Kaum Miskin*. Yogyakarta
- Sarimah. 2016. *Pelaksanaan Pembangunan Dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014*. Jurnal Umrah.
- Sjafari, Agus. 2014. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soekanto, Soejono. 1999. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Subarsono. 2016. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Adetama

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman

Perwako Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah

Winarno, Bambang. 2018. *Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung*. Vol 6 No. 1 (66-74).